

## **Meningkatkan Literasi Digital Dan Ketahanan Terhadap Hoaks Melalui Pembelajaran Ppkn: *Analisis Civic Knowledge, Skills Dan Disposition***

**Sulistyaningati Purwandari**

S2 PPKn, FISIPOL, Universitas Negeri Surabaya, [sulistyaningati.purwandari@gmail.com](mailto:sulistyaningati.purwandari@gmail.com)

**Bukhari Muslim**

S2 PPKn, FISIPOL, Universitas Negeri Surabaya, [25041965010@mhs.unesa.ac.id](mailto:25041965010@mhs.unesa.ac.id)

**Ayunda Mahdalena Putri**

S2 PPKn, FISIPOL, Universitas Negeri Surabaya, [ayundaputri1953@gmail.com](mailto:ayundaputri1953@gmail.com)

**Listyaningsih**

S2 PPKn, FISIPOL, Universitas Negeri Surabaya, [listyaningsih@unesa.ac.id](mailto:listyaningsih@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Maraknya penyebaran hoaks di ruang digital menjadi tantangan serius bagi pembentukan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab, khususnya di kalangan peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan hoaks tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi informasi, tetapi juga merupakan persoalan kewarganegaraan yang menuntut penguatan literasi digital melalui pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan literasi digital dan ketahanan siswa terhadap hoaks melalui penguatan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Balen yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan analisis dokumen perencanaan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang kontekstual dan reflektif mampu memperkuat pemahaman siswa mengenai hoaks sebagai persoalan kewarganegaraan (civic knowledge), mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi dalam menyikapi informasi digital (civic skills), serta membentuk sikap kehati-hatian, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap nilai Pancasila dalam penggunaan media digital (civic disposition). Meskipun demikian, implementasi pembelajaran masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital awal siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, pengaruh kuat media sosial di luar sekolah, serta kesiapan guru. Temuan ini menegaskan bahwa PPKn memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan terhadap hoaks melalui penguatan kompetensi kewarganegaraan digital secara terpadu.

**Kata Kunci:** Literasi Digital, Hoaks, Pembelajaran PPKn

### **Abstract**

*The widespread spread of hoaxes in the digital space poses a serious challenge to the formation of critical and responsible citizens, particularly among students. This phenomenon demonstrates that the issue of hoaxes is not only related to information technology aspects, but also a citizenship issue that demands strengthening digital literacy through education. This study aims to analyze the role of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) learning in improving digital literacy and student resilience to hoaxes by strengthening civic knowledge, civic skills, and civic disposition. The study used a qualitative approach with a descriptive analytical research type. The research subjects were grade VIII D students of SMP Negeri 2 Balen who were selected purposely. Data collection techniques included in-depth interviews, learning observations, and analysis of lesson planning documents. The results of the study indicate that contextual and reflective PPKn learning can strengthen students' understanding of hoaxes as a citizenship issue (civic knowledge), develop critical thinking and communication skills in responding to digital information (civic skills), and form an attitude of caution, social responsibility, and commitment to Pancasila values in the use of digital media (civic disposition). However, the implementation of learning still faces challenges such as low initial digital literacy levels among students, limited learning time, the strong influence of social media outside of school, and teacher preparedness. These findings confirm that Civics (PPKn) plays a strategic role in building resilience against hoaxes through an integrated strengthening of digital citizenship competencies.*

**Keywords:** Digital Literacy, Hoaxes, PPKn Learning

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara warga negara mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi secara signifikan. Media sosial dan platform digital menjadi ruang baru bagi praktik kewarganegaraan, namun pada saat yang sama juga memunculkan persoalan serius berupa maraknya hoaks dan disinformasi. Hoaks tidak hanya menyesatkan secara informasi, tetapi juga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi, memicu konflik sosial, serta menggerus nilai-nilai kebangsaan apabila tidak disikapi secara kritis dan bertanggung jawab

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi faktor utama yang menyebabkan peserta didik rentan terhadap hoaks. Peserta didik cenderung mengonsumsi dan menyebarkan informasi secara instan tanpa melakukan verifikasi sumber dan validasi kebenaran isi pesan (Juditha, 2020). Kondisi ini diperkuat oleh karakteristik generasi muda yang sangat intens berinteraksi dengan media digital, namun belum sepenuhnya dibekali kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital (Sutrisno & Anwar, 2020).

Dalam konteks tersebut, literasi digital tidak dapat dipahami semata sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat teknologi, melainkan sebagai kemampuan berpikir kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam mengelola informasi. Literasi digital memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi kewarganegaraan karena menyangkut kemampuan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara cerdas di ruang publik digital (Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan di era *post-truth*.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan berkarakter di tengah tantangan disinformasi. PPKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan normatif tentang negara dan hukum, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kesadaran kritis, keterampilan partisipatif, dan sikap kewarganegaraan yang bertanggung jawab (Iskandar & Nurgiansah, 2022). Dalam konteks ini, isu hoaks relevan untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran PPKn karena berkaitan langsung dengan praktik kewarganegaraan sehari-hari di ruang digital.

Sejumlah kajian menegaskan bahwa pembelajaran PPKn yang kontekstual dan berbasis isu aktual mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami persoalan sosial-politik secara kritis, termasuk fenomena hoaks. Integrasi isu hoaks dalam pembelajaran PPKn mendorong peserta didik untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban warga negara, serta etika bermedia sosial dalam kehidupan nyata (Kholis & Rosyada, 2022). Dengan demikian, pembelajaran PPKn berfungsi sebagai

ruang pedagogis untuk membangun ketahanan peserta didik terhadap disinformasi.

Kerangka *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* menjadi landasan konseptual yang relevan dalam menganalisis peran PPKn dalam meningkatkan literasi digital dan ketahanan terhadap hoaks. *Civic knowledge* mencakup pemahaman peserta didik mengenai hoaks sebagai persoalan kewarganegaraan yang berdampak pada kehidupan demokratis. *Civic skills* berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan berkomunikasi secara rasional dalam menyikapi informasi digital. Sementara itu, *civic disposition* merujuk pada sikap kehati-hatian, tanggung jawab sosial, dan komitmen moral dalam menggunakan media digital (Rahmawati et al., 2022).

Meskipun demikian, implementasi pembelajaran PPKn dalam penguatan literasi digital dan ketahanan terhadap hoaks masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran PPKn di sekolah masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan isu literasi digital secara sistematis dan eksplisit (Sutrisno & Anwar, 2020). Selain itu, kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran berbasis isu digital juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran PPKn dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap hoaks (Iskandar & Nurgiansah, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan literasi digital dan ketahanan peserta didik terhadap hoaks melalui penguatan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan di era digital serta kontribusi praktis bagi guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran PPKn yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan kewarganegaraan digital.

Fenomena hoaks di ruang digital juga menunjukkan bahwa tantangan kewarganegaraan saat ini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah bergeser ke ruang virtual yang bersifat tanpa batas. Ruang digital memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus distributor informasi, sehingga tanggung jawab kewarganegaraan menjadi semakin kompleks. Tanpa bekal literasi digital yang memadai, peserta didik berpotensi terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan dan sulit membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi informasi.

Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang institusional yang dapat menanamkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan secara sistematis. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir dan karakter peserta didik agar mampu menyikapi realitas sosial secara kritis. Oleh karena itu, isu hoaks perlu dipahami sebagai bagian dari tantangan pedagogis yang harus direspons secara

sadar melalui proses pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki karakteristik yang relevan untuk merespons tantangan tersebut karena berorientasi pada pembentukan warga negara yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter. Melalui PPKn, peserta didik diarahkan untuk memahami nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam penggunaan media digital. Integrasi isu hoaks dalam pembelajaran PPKn memungkinkan peserta didik melihat keterkaitan antara nilai kewarganegaraan dan praktik bermedia sosial sehari-hari (Iskandar & Nurgiansah, 2022).

Literatur menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang mengaitkan materi ajar dengan isu aktual dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan keterlibatan peserta didik. Ketika peserta didik dihadapkan pada persoalan nyata yang mereka alami sendiri di ruang digital, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan reflektif. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam situasi konkret, termasuk dalam menyikapi hoaks (Kholis & Rosyada, 2022).

Penguatan literasi digital melalui PPKn juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran bahwa tindakan di ruang digital memiliki implikasi sosial yang luas. Peserta didik mulai memahami bahwa menyebarkan informasi palsu bukan sekadar kesalahan individu, melainkan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu tatanan sosial. Kesadaran semacam ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial sebagai bagian dari karakter kewarganegaraan digital.

Dari perspektif *civic knowledge*, pembelajaran PPKn memberikan landasan konseptual bagi peserta didik untuk memahami hoaks sebagai persoalan kewarganegaraan. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang dampak hoaks terhadap kehidupan demokratis, persatuan bangsa, serta kepercayaan publik. Dengan pengetahuan yang memadai, peserta didik memiliki dasar rasional untuk bersikap kritis terhadap informasi yang mereka terima di ruang digital (Rahmawati et al., 2022).

Sementara itu, pengembangan *civic skills* melalui pembelajaran PPKn tercermin dalam kemampuan peserta didik untuk menganalisis informasi, mengajukan pertanyaan kritis, dan mengemukakan pendapat secara argumentatif. Keterampilan tersebut penting agar peserta didik tidak bersikap pasif sebagai konsumen informasi, tetapi mampu berperan aktif dan reflektif dalam ruang publik digital. Pembelajaran PPKn yang dialogis dan partisipatif menjadi sarana efektif guna menumbuhkan adanya keterampilan kewarganegaraan tersebut.

Namun demikian, penguatan literasi digital dan ketahanan terhadap hoaks melalui PPKn tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan implementatif. Kurikulum yang padat, keterbatasan

waktu pembelajaran, serta variasi kompetensi guru dalam literasi digital seringkali menjadi kendala dalam mengintegrasikan isu hoaks secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan adaptif agar PPKn mampu merespons tantangan kewarganegaraan digital secara efektif.

Oleh karena itu, kajian empiris mengenai peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan literasi digital dan ketahanan terhadap hoaks menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian semacam ini tidak hanya memberikan gambaran tentang praktik pembelajaran di lapangan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model pembelajaran PPKn yang relevan dengan tantangan era digital. Dengan demikian, PPKn diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam membentuk warga negara muda yang cerdas, kritis, dan berkarakter di tengah arus disinformasi yang semakin kompleks.

## METODE

Penelitian ini dirancang untuk mendalami peran krusial pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan literasi digital dan ketahanan siswa terhadap fenomena hoaks. Pendekatan yang digunakan dipilih untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual mengenai proses sosial dan strategi pengajaran yang diterapkan di lapangan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya adalah pada pemahaman mendalam (*verstehen*) terhadap fenomena sosial dalam hal ini, strategi guru dan persepsi siswa terkait isu hoaks yang tidak dapat diukur secara statistik (Creswell & Creswell, 2018). Sebagai penelitian deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara holistik dan terperinci praktik yang dilakukan oleh guru PPKn, kemudian menganalisis temuan tersebut secara kritis menggunakan kerangka konseptual Tiga Dimensi Kewarganegaraan (*Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Disposition*). Analisis ini esensial untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan digital yang utuh, sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan kontemporer (Kholis & Rosyada, 2022).

Penentuan lokasi dan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan. Teknik ini memastikan bahwa informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman relevan, dan berada pada posisi strategis terkait masalah hoaks dan pembelajaran PPKn (Sugiyono,

2020). Penelitian ini dilaksanakan di SMP negeri 2 Balen karena dianggap representative dalam menghadapi tantangan literasi digital dan memiliki dinamika penggunaan media social yang tinggi di kalangan siswanya. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8D SMP Negeri 2 Balen sejumlah 31 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini mengutamakan kedalaman data, yang dicapai melalui wawancara mendalam sebagai teknik utama, didukung oleh observasi dan analisis dokumen sebagai triangulasi data. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara semi terstruktur. Pedoman ini dikembangkan secara spesifik untuk menggali ketiga dimensi *Civic* dalam konteks penanganan hoaks. Untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data, dilakukan observasi non partisipan untuk mengamati secara langsung interaksi guru dan siswa selama pembelajaran PPKn yang berkaitan dengan materi literasi digital dan isu hoaks dan Analisis Dokumen seperti Perencanaan Pembelajaran Mendalam (PPM) PPKn untuk memverifikasi kesesuaian antara rencana pengajaran dengan praktik di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pembelajaran PPKn dalam Penguatan Literasi Digital

Implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 2 Balen menunjukkan adanya upaya sistematis guru dalam merespons tantangan literasi digital dan maraknya penyebaran hoaks di kalangan peserta didik. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan kontemporer, PPKn tidak lagi dipahami semata sebagai transmisi pengetahuan normatif, tetapi sebagai sarana pembentukan warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi realitas sosial, termasuk di ruang digital (Kholis & Rosyad, 2022). Berdasarkan hasil observasi kelas dan wawancara mendalam, isu hoaks diintegrasikan secara kontekstual ke dalam materi PPKn, khususnya pada pembahasan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta etika bermedia sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi digital merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, karena berkaitan langsung dengan kemampuan warga negara dalam mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi secara kritis (Budimansyah, 2019; Nugroho & Syarifuddin, 2021).

Selain aspek pedagogis, penguatan literasi digital dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Balen juga diarahkan pada pengembangan kecakapan

verifikasi informasi secara mandiri. Guru memberikan panduan praktis mengenai cara mengidentifikasi keaslian sumber berita dan mengenali ciri-ciri manipulasi informasi yang sering muncul di platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembelajaran telah meluas dari sekadar pemahaman teoretis menuju penguasaan keterampilan teknis-kritis yang esensial bagi warga negara digital. Penguasaan keterampilan ini sangat krusial, mengingat ketidakmampuan warga negara dalam membedakan fakta dan opini dapat melemahkan fondasi rasionalitas dalam kehidupan berdemokrasi (Winarno, 2020).

Internalisasi nilai-nilai karakter dalam proses diskusi kelas juga menjadi instrumen penting untuk membentuk etika digital siswa. Guru menekankan bahwa setiap tindakan di media sosial, termasuk menyebarkan informasi, terikat pada tanggung jawab moral dan hukum sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Siswa diajak untuk merefleksikan bahwa perilaku bijak dalam berinternet bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, melainkan juga tentang integritas dan kepedulian terhadap keharmonisan sosial. Kajian terbaru menegaskan bahwa integrasi etika digital ke dalam kurikulum kewarganegaraan sangat efektif dalam menekan angka penyebaran konten negatif di kalangan remaja (Prawitno & Wardhani, 2023).

Guru mengaitkan materi ajar dengan fenomena aktual yang dekat dengan pengalaman siswa, seperti informasi viral di media sosial dan pesan berantai di platform digital. Strategi kontekstual ini terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan membantu mereka memahami relevansi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari (Sutrisno & Anwar, 2020). Dengan demikian, pembelajaran PPKn berfungsi sebagai ruang pedagogis untuk membangun kesadaran kritis siswa terhadap dampak sosial dan politik dari penyebaran hoaks. Interaksi guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung secara dialogis dan reflektif. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong diskusi kritis, sementara siswa diberi ruang untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, dan penilaian mereka terhadap informasi digital. Pola pembelajaran semacam ini sejalan dengan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pengembangan kompetensi berpikir kritis dan partisipatif sebagai fondasi warga negara demokratis (Banks, 2017; Wahab & Sapriya, 2019).

Hasil analisis dokumen perencanaan pembelajaran menunjukkan bahwa guru telah memasukkan unsur literasi digital dan isu hoaks ke dalam tujuan

pembelajaran dan aktivitas kelas, meskipun belum selalu dirumuskan secara eksplisit sebagai pembelajaran literasi digital. Praktik ini mencerminkan upaya integratif dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan digital siswa, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian-kajian pendidikan kewarganegaraan di era digital (Choi, 2016; Iskandar & Nurgiansah, 2022).

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

### **Penguatan Civic Knowledge dalam Pembelajaran PPKn terkait Hoaks**

Penguatan civic knowledge dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Balen tampak dari upaya guru membangun pemahaman konseptual siswa mengenai hoaks sebagai persoalan kewarganegaraan di era digital. Pembelajaran tidak berhenti pada pengenalan istilah hoaks secara umum, tetapi diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik hoaks, mekanisme penyebarannya, serta dampak sosial, politik, dan kebangsaan yang ditimbulkannya. Hal ini menunjukkan bahwa PPKn berfungsi sebagai sarana pengembangan pengetahuan kewarganegaraan yang kontekstual dan relevan dengan tantangan aktual masyarakat digital.

Berdasarkan hasil wawancara, siswa memperoleh pemahaman bahwa hoaks bukan sekadar informasi palsu, melainkan fenomena yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan kepercayaan publik. Guru mengaitkan isu hoaks dengan materi Pancasila, khususnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, serta dengan prinsip hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokratis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa civic knowledge mencakup pemahaman tentang sistem sosial, nilai, dan norma yang mengatur kehidupan warga negara, termasuk dalam ruang digital (Wahab & Sapriya, 2019; Budimansyah, 2019). Dalam proses pembelajaran, siswa juga diperkenalkan pada konsep literasi digital sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan modern. Pemahaman mengenai pentingnya mengenali sumber informasi, membedakan fakta dan opini, serta memahami motif di balik penyebaran informasi menjadi bagian dari pengetahuan kewarganegaraan yang dikembangkan melalui PPKn. Hal ini menguatkan temuan Choi (2016) yang menegaskan bahwa pengetahuan kewarganegaraan di era digital harus mencakup pemahaman tentang ekosistem informasi dan media digital sebagai ruang baru praktik kewarganegaraan.

Analisis terhadap respons siswa menunjukkan bahwa penguatan civic knowledge melalui pembelajaran PPKn berkontribusi pada meningkatnya kesadaran siswa terhadap risiko hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mulai memahami bahwa tindakan menerima dan menyebarkan informasi memiliki implikasi sosial yang luas, sehingga memerlukan sikap kritis dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pengetahuan ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan ketahanan terhadap hoaks, karena tanpa pemahaman konseptual yang memadai, siswa cenderung bersikap pasif dan mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan (Iskandar & Nurgiansah, 2022). Dengan demikian, pembelajaran PPKn berperan strategis dalam membangun civic knowledge siswa yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi fenomena hoaks. Penguatan pengetahuan kewarganegaraan ini menjadi dasar bagi pengembangan dimensi kewarganegaraan lainnya, yaitu civic skills dan civic disposition, dalam rangka membentuk warga negara muda yang cerdas, kritis, dan berdaya tahan terhadap disinformasi di era digital.

### **Pengembangan Civic Skills melalui Pembelajaran PPKn dalam Menghadapi Hoaks**

Pengembangan civic skills melalui pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Balen tampak pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan kewarganegaraan untuk menganalisis, menilai, dan merespons informasi digital secara kritis. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, civic skills mencakup keterampilan intelektual dan partisipatif yang memungkinkan warga negara berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis, termasuk dalam menghadapi arus informasi dan disinformasi di media digital. Lebih jauh lagi, penguatan *civic knowledge* di SMP Negeri 2 Balen juga mencakup pemahaman mengenai regulasi hukum yang mengatur ruang digital di Indonesia, seperti UU ITE. Guru memberikan wawasan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah tanpa batas, melainkan dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan nasional untuk menjaga ketertiban umum. Pengetahuan mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran hoaks bertujuan agar siswa menyadari bahwa ruang siber adalah ruang publik yang memiliki aturan main formal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengetahuan kewarganegaraan harus membekali individu dengan pemahaman hukum dan aturan yang berlaku agar mereka dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat (Winarno, 2020).

Integrasi nilai-nilai karakter dalam penyampaian materi hoaks menjadi kunci dalam menjembatani

antara pengetahuan teoritis dan praktik keseharian siswa. Guru menekankan bahwa etika berkomunikasi digital merupakan cerminan dari identitas nasional yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa. Siswa diajak untuk merefleksikan bahwa setiap klik dan "bagikan" yang mereka lakukan memiliki beban moral yang besar terhadap keutuhan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terbaru, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan digital sangat krusial untuk membentengi generasi muda dari degradasi moral akibat paparan informasi yang tidak terfilter (Fadhila & Syafii, 2023).

Hasil observasi menunjukkan bahwa guru PPKn mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi kritis berbasis kasus hoaks yang beredar di media sosial. Siswa dilatih untuk mengidentifikasi isi pesan, menilai kredibilitas sumber, serta mendiskusikan kemungkinan dampak sosial dari penyebaran informasi palsu. Praktik pembelajaran ini sejalan dengan temuan Sari dan Widodo (2021) yang menegaskan bahwa pembelajaran PPKn berbasis isu aktual mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa sebagai bagian dari civic skills. Selain keterampilan analisis, pembelajaran PPKn juga mengembangkan keterampilan komunikasi kewarganegaraan siswa. Dalam diskusi kelas, siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, menyusun argumen, serta menanggapi pandangan teman secara rasional dan santun. Keterampilan ini penting dalam membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi dalam ruang publik secara demokratis. Hal ini sejalan dengan penelitian Prasetyo dan Hamid (2020) yang menyatakan bahwa diskusi deliberatif dalam pembelajaran PPKn berkontribusi signifikan terhadap penguatan keterampilan partisipasi dan komunikasi kewarganegaraan siswa.

Pembelajaran PPKn juga melatih keterampilan pengambilan keputusan siswa dalam penggunaan media digital. Siswa mulai menunjukkan kemampuan untuk tidak langsung mempercayai dan menyebarkan informasi yang diterima, melainkan melakukan pertimbangan kritis sebelum bertindak. Temuan ini sejalan dengan kajian Rahmawati, Supriatna, dan Winataputra (2022) yang menegaskan bahwa literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan pada pembentukan kemampuan reflektif dan tanggung jawab sosial warga negara dalam mengambil keputusan di ruang digital. Pengembangan civic skills tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berperan sebagai sarana pembelajaran aktif yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga keterampilan praktis kewarganegaraan. Dengan keterampilan berpikir

kritis, komunikasi demokratis, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, siswa memiliki modal penting untuk membangun ketahanan terhadap hoaks. Civic skills ini menjadi penghubung antara civic knowledge dan civic disposition dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan digital yang utuh dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, efektivitas penguatan *civic knowledge* ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengadopsi metodologi pembelajaran yang interaktif dan berbasis masalah (*problem-based learning*). Dengan menganalisis studi kasus hoaks yang nyata, siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi bertransformasi menjadi agen verifikasi informasi di lingkungan sebaya mereka. Pengetahuan yang mendalam mengenai ekosistem digital ini pada akhirnya akan bermuara pada terbentuknya ketahanan digital nasional yang dimulai dari bangku sekolah. Hal ini mempertegas bahwa transformasi pendidikan kewarganegaraan ke arah digital merupakan keniscayaan untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bertindak di dunia maya (Solihatin & Rahmawati, 2024).

#### **Pembentukan Civic Disposition sebagai Ketahanan terhadap Hoaks melalui Pembelajaran PPKn**

Pembentukan civic disposition melalui pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Balen terlihat dari berkembangnya sikap kewarganegaraan siswa dalam menyikapi informasi digital secara bertanggung jawab. Civic disposition dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai sikap individual, tetapi sebagai karakter kewarganegaraan yang tercermin dalam tanggung jawab moral, kepedulian sosial, kehati-hatian, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di ruang digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn mendorong siswa untuk menyadari bahwa aktivitas menerima dan menyebarkan informasi merupakan bagian dari praktik kewarganegaraan. Siswa mulai menunjukkan sikap kehati-hatian dalam merespons informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap ini mencerminkan berkembangnya disposisi kewarganegaraan berupa tanggung jawab dan kontrol diri, yang menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan terhadap hoaks. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa civic disposition terbentuk melalui pembiasaan nilai, keteladanan, serta internalisasi norma yang berlangsung secara berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan (Maryana, 2019).

Pembelajaran PPKn juga berperan dalam membentuk orientasi nilai kebangsaan siswa ketika berhadapan dengan hoaks yang berpotensi menimbulkan perpecahan sosial. Melalui penguatan literasi kewarganegaraan, siswa diarahkan untuk memahami bahwa hoaks bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi dapat berdampak pada luntarnya persatuan, meningkatnya konflik sosial, serta melemahnya wawasan kebangsaan. Dalam konteks ini, civic disposition berfungsi sebagai sikap dasar yang menuntun siswa untuk mengedepankan kepentingan bersama dan menjaga harmoni sosial. Pandangan ini sejalan dengan kajian yang menegaskan bahwa penguatan civic literacy, khususnya pada dimensi civic disposition, berperan penting dalam membentuk warga negara yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan di tengah arus disinformasi (Tachyudin, Cahyono, & Utami, 2020).

Pembelajaran PPKn berbasis literasi digital turut menumbuhkan sikap reflektif dan kesadaran etis siswa dalam menggunakan media digital. Siswa mulai menunjukkan kecenderungan untuk bersikap jujur, tidak mudah terprovokasi, serta peduli terhadap dampak sosial dari informasi yang mereka konsumsi dan sebarkan. Sikap-sikap tersebut mencerminkan penguatan civic disposition sebagai karakter kewarganegaraan digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga memperkuat disposisi kewarganegaraan seperti tanggung jawab sosial, partisipasi aktif, dan semangat kebangsaan (Rahayu, Ulum, & Putra, 2025). Pembentukan civic disposition melalui pembelajaran PPKn menjadi elemen kunci dalam membangun ketahanan siswa terhadap hoaks. Ketahanan tersebut tidak hanya ditopang oleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga oleh sikap kewarganegaraan yang berakar pada nilai Pancasila, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial. Civic disposition berperan sebagai pengendali etis yang melengkapi civic knowledge dan civic skills dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan digital yang utuh.

#### **Tantangan Implementasi Pembelajaran PPKn dalam Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Hoaks**

Meskipun pembelajaran PPKn memiliki potensi strategis dalam meningkatkan literasi digital dan ketahanan terhadap hoaks, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut muncul baik dari aspek pedagogis, kultural, maupun struktural, yang memengaruhi efektivitas pembelajaran PPKn dalam membentuk

kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik secara optimal. Tantangan selanjutnya terletak pada kesenjangan antara fasilitas teknologi yang tersedia dengan pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif di lingkungan sekolah. Meskipun infrastruktur digital mulai tersedia, optimalisasi perangkat tersebut untuk simulasi deteksi hoaks atau praktik *fact-checking* dalam kelas PPKn masih sangat terbatas. Kurangnya ketersediaan modul ajar yang secara spesifik mengintegrasikan kasus-kasus disinformasi terkini membuat pembelajaran cenderung bersifat tekstual dan kurang relevan dengan dinamika media sosial yang cepat berubah. Fenomena ini dipertegas oleh pandangan bahwa tanpa dukungan media pembelajaran yang adaptif, pengajaran nilai-nilai kewarganegaraan akan kehilangan daya tarik dan relevansinya di mata generasi asli digital (*digital natives*) (Suryono, 2017).

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kemampuan literasi digital awal peserta didik, khususnya dalam memilah dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari media sosial. Peserta didik cenderung terbiasa mengonsumsi informasi secara instan tanpa melakukan penelusuran sumber dan validasi isi. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa budaya berbagi informasi tanpa verifikasi masih menjadi karakter dominan di kalangan generasi muda, sehingga hoaks mudah diterima dan disebarluaskan (Juditha, 2018).

Secara sosiokultural, tantangan juga muncul dari adanya pengaruh lingkungan keluarga dan komunitas yang belum sepenuhnya mendukung literasi digital. Seringkali, nilai-nilai kritis yang diajarkan di sekolah terbentur oleh pola komunikasi di rumah, di mana orang tua atau anggota keluarga lainnya justru menjadi pelaku penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Hal ini menciptakan hambatan dalam proses internalisasi karakter warga negara yang bijak, karena siswa berada dalam lingkaran pengaruh yang saling bertolak belakang. Riset terbaru menunjukkan bahwa sinkronisasi antara pendidikan sekolah dan literasi digital berbasis keluarga merupakan tantangan krusial yang menentukan keberhasilan pembentukan etika berwarganegara di ruang siber (Prawitno & Wardhani, 2023).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan waktu dan ruang dalam pembelajaran PPKn. Materi PPKn yang cukup padat seringkali membuat penguatan literasi digital dan isu hoaks hanya dibahas secara implisit dan belum menjadi fokus pembelajaran yang sistematis. Akibatnya, pengembangan dimensi sikap dan keterampilan kewarganegaraan digital belum sepenuhnya

terinternalisasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah masih dominan pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan kontekstual digital belum digarap secara optimal (Sutrisno & Anwar, 2020).

Selain itu, pengaruh kuat ekosistem media sosial di luar sekolah juga menjadi tantangan signifikan. Informasi yang diterima peserta didik di luar lingkungan sekolah seringkali lebih intens dan persuasif dibandingkan pembelajaran di kelas. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai kewarganegaraan yang ditanamkan melalui PPKn berhadapan langsung dengan arus disinformasi yang masif. Penelitian lain menunjukkan bahwa tanpa penguatan literasi digital yang berkelanjutan, peserta didik rentan mengalami disonansi nilai antara pembelajaran formal dan realitas digital sehari-hari (Rahadi, 2017).

Tantangan lainnya adalah kesiapan guru dalam mengintegrasikan isu hoaks dan literasi digital secara pedagogis. Tidak semua guru PPKn memiliki akses, pelatihan, atau pengalaman yang memadai dalam mengelola pembelajaran berbasis isu digital. Hal ini berdampak pada terbatasnya variasi metode pembelajaran kritis dan reflektif yang dapat mendorong ketahanan siswa terhadap hoaks. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa penguatan literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan memerlukan peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan (Nasrullah et al., 2017).

Dengan demikian, tantangan implementasi pembelajaran PPKn dalam penguatan literasi digital dan ketahanan hoaks bersifat multidimensional. Tantangan tersebut menuntut adanya penguatan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual, dukungan kebijakan sekolah, serta peningkatan kompetensi guru agar PPKn mampu berfungsi secara optimal dalam membentuk warga negara muda yang kritis, berkarakter, dan berdaya tahan terhadap disinformasi di era digital.

Terakhir, aspek evaluasi dalam pembelajaran PPKn masih menjadi kendala struktural dalam mengukur keberhasilan penguatan ketahanan terhadap hoaks. Instrumen penilaian yang ada saat ini masih dominan berorientasi pada penguasaan materi hafalan dibandingkan pada penilaian unjuk kerja atau penilaian autentik yang menguji kemampuan kritis siswa dalam menghadapi disinformasi secara nyata. Tantangan ini menyebabkan sulitnya memetakan sejauh mana kompetensi kewarganegaraan digital siswa telah terbentuk secara substantif di luar ranah kognitif. Dalam konteks pendidikan modern,

transformasi instrumen evaluasi menjadi sangat penting agar pendidikan kewarganegaraan dapat benar-benar melahirkan warga negara yang memiliki ketahanan mental dan intelektual terhadap manipulasi informasi di era digital (Hidayat & Pratama, 2024).

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peranan vital sebagai instrumen strategis dalam membentengi siswa dari arus disinformasi. Melalui pendekatan yang bersifat kontekstual dan reflektif, PPKn mampu mentransformasi pemahaman siswa dari sekadar pengenalan istilah hoaks menjadi sebuah kesadaran kritis. Proses ini memungkinkan siswa mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang utuh, yang mengintegrasikan tiga pilar utama: *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) dalam ekosistem digital. Penguatan *civic knowledge* diwujudkan melalui pendalaman materi mengenai karakteristik disinformasi dan dampak destruktifnya terhadap stabilitas demokrasi serta nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan itu, *civic skills* siswa diasah melalui latihan berpikir kritis dan verifikasi data, sehingga mereka memiliki kecakapan dalam membedakan fakta dan opini. Pada akhirnya, kompetensi ini bermuara pada terbentuknya *civic disposition*, yakni munculnya sikap penuh tanggung jawab, etika komunikasi yang santun, dan komitmen moral untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan edukatif.

Meskipun memiliki potensi besar, efektivitas PPKn dalam membangun ketahanan hoaks masih dibayangi oleh berbagai tantangan nyata. Hambatan seperti rendahnya literasi digital awal siswa, keterbatasan alokasi waktu kurikuler, serta derasnya pengaruh konten negatif di media sosial menuntut adanya adaptasi pedagogis yang lebih lincah. Selain itu, kesiapan guru dalam menguasai teknologi dan isu digital terkini menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan terhadap hoaks tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam ekosistem pendidikan yang lebih luas.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar guru PPKn mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih eksplisit dan sistematis dalam mengintegrasikan literasi digital dan isu hoaks ke dalam materi

pembelajaran. Sekolah juga perlu memberikan dukungan melalui kebijakan dan budaya sekolah yang mendorong praktik literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab.

Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru PPKn melalui pelatihan yang berfokus pada pedagogi literasi digital dan pembelajaran berbasis isu aktual. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut penguatan literasi digital dan ketahanan hoaks melalui desain penelitian yang berbeda, seperti penelitian tindakan kelas atau pendekatan kuantitatif, serta melibatkan konteks sekolah dan jenjang pendidikan yang lebih beragam guna memperkaya pengembangan teori dan praktik pendidikan kewarganegaraan di era digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan warga negara demokratis. *Jurnal Civics*, 16(1), 1–10.
- Budimansyah, D. (2019). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fadhila, N., & Syafii, A. (2023). "Internalisasi Nilai Pancasila dalam Literasi Digital sebagai Upaya Menangkal Disinformasi di Kalangan Pelajar". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 11(2), 145-158.
- Hidayat, A. R., & Pratama, M. N. (2024). "Transformasi Instrumen Penilaian PPKn dalam Mengukur Kompetensi Digital Citizen di Sekolah Menengah". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(1), 55-70.
- Iskandar, D., & Nurgiansah, T. H. (2022). "The Role of Civic Education in Countering Hoaxes in the Digital Age". *Journal of Digital Literacy and Citizenship*, 2(1), 12-25.
- Iskandar, S., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pendidikan kewarganegaraan dan literasi digital di era post-truth. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 85–96.
- Juditha, C. (2018). *Interaksi Komunikasi di Media Sosial dan Hoaks*. Jakarta: Kencana.
- Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoaks di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Kholis, N., & Rosyada, D. (2022). Urgensi civic skills dalam pembelajaran PPKn di sekolah menengah untuk menangkal berita palsu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 10(3), 250–265.
- Maryana, K. (2019). Penguatan pendidikan karakter siswa melalui pendekatan berbasis budaya sekolah sebagai upaya pembentukan civic disposition. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Sebelas Maret.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nasrullah, R., Aditya, W., Satya, T. I., Nento, M. N., Hanifah, N., Miftahussururi, & Akbari, Q. S. (2017). Literasi digital: Gerakan literasi nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 127–140.
- Nasrullah, R., dkk. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nugroho, Y., & Syarifuddin, A. (2021). Literasi digital sebagai penguatan kompetensi kewarganegaraan abad ke-21. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45–56.
- Prasetyo, A., & Hamid, S. I. (2020). Penguatan civic skills melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis diskusi deliberatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 113–124.
- Prawitno, A., & Wardhani, P. S. (2023). "Hambatan Sosiokultural dalam Implementasi Literasi Digital pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 210-225.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoaks di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70.
- Rahayu, D. A., Ulum, B., & Putra, A. A. P. E. (2025). Literasi digital dalam pembelajaran PPKn berbasis saintifik untuk penguatan civic disposition mahasiswa. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(3), 1642–1649.
- Rahmawati, Y., Supriatna, N., & Winataputra, U. S. (2022). Literasi digital sebagai penguatan kompetensi kewarganegaraan di era post-truth. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 45–56.

- Sari, D. P., & Widodo, S. T. (2021). Pembelajaran PPKn berbasis isu aktual dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 98–108.
- Solihatin, E., & Rahmawati, D. (2024). "Digital Citizenship: Strategi Pengembangan Civic Knowledge melalui Media Sosial dalam Pembelajaran PPKn". *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 10(1), 88-102
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Tachyudin, M., Cahyono, H., & Utami, P. S. (2020). Penguatan civic literasi dalam membentuk wawasan kebangsaan. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 4(2), 31–39.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono. (2017). *Pembelajaran PPKn di Era Globalisasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sutrisno, & Anwar, M. S. (2020). Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 101–110.
- Sutrisno, S., & Anwar, K. (2020). "Tantangan Guru PPKn dalam Menghadapi Era Disrupsi Informasi di Sekolah". *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(2), 112-124.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2019). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.